

Transformasi Integrasi Transportasi Publik dalam Mendukung Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan melalui Kajian *Systematic Literature Review*

Amanda Devina Khoerunisa¹, Ardelia Belvarani Irawan²

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Indonesia

² Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Indonesia

Keywords:

*Public Transport
Integration
Public Service
Governance
Multimodal
Transport*

Abstract: *This study aims to examine the development of public transport integration studies and identify the factors influencing the success of public transport integration. The study employed a Systematic Literature Review (SLR) method using the PRISMA 2020 guidelines on 12 articles published between 2023 and 2026, collected from Google Scholar using Publish or Perish. The findings indicate that studies on public transport integration have evolved from a technical approach toward a multidimensional approach encompassing system, service, and governance aspects. Factors influencing successful integration include network connectivity, service synchronization, integrated fare and information systems, accessibility, feeder service quality, as well as institutional coordination and regulatory support. This study concludes that public transport integration is not merely related to intermodal connectivity, but also constitutes a form of public service integration that requires collaborative governance and a user-oriented approach.*

Kata Kunci:

*Integrasi
Transportasi Publik
Pelayanan Publik
Tata Kelola
Transportasi
Multimoda*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan kajian integrasi transportasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman PRISMA 2020 terhadap 12 artikel publikasi tahun 2023–2026 yang dikumpulkan dari Google Scholar menggunakan aplikasi Publish or Perish. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian integrasi transportasi publik berkembang dari pendekatan teknis menuju pendekatan multidimensi yang mencakup aspek sistem, layanan, dan tata kelola. Faktor keberhasilan integrasi meliputi keterhubungan jaringan, sinkronisasi layanan, integrasi tarif dan informasi, aksesibilitas, kualitas layanan feeder, serta koordinasi kelembagaan dan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan konektivitas antarmoda, tetapi juga merupakan bagian dari integrasi pelayanan publik yang membutuhkan tata kelola kolaboratif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.*

Pendahuluan

Integrasi transportasi publik merupakan upaya untuk menghubungkan berbagai moda transportasi melalui keterpaduan sistem, layanan, dan tata kelola agar perpindahan antarlayanan dapat berlangsung lebih mudah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (D. Setiawan et al., 2024; United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 2024). Dalam konteks perkotaan, integrasi transportasi tidak hanya berkaitan dengan konektivitas antarmoda, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapat mengakses layanan publik secara lebih merata. Karena itu, integrasi transportasi publik menjadi salah satu isu penting dalam kajian administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan, koordinasi antarinstansi, dan tata kelola layanan publik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan integrasi transportasi publik masih menghadapi banyak tantangan. United Nations (ESCAP), (2024) menjelaskan bahwa sistem transportasi di kawasan Asia masih berjalan secara terpisah, baik dari sisi jaringan, layanan, maupun informasi. Sementara itu, World Bank, (2024) menyoroti lemahnya koordinasi antar-sektor dan antar-pemerintahan yang menyebabkan integrasi transportasi belum berjalan optimal. Kondisi tersebut juga terlihat di Indonesia, khususnya di kawasan metropolitan seperti Jabodetabek yang masih menghadapi persoalan konektivitas layanan, integrasi tarif, dan koordinasi antarpengyelenggara transportasi. Situasi ini menunjukkan bahwa integrasi transportasi publik membahas persoalan mobilitas yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan pemerataan akses bagi masyarakat.

Dalam kajian administrasi publik, integrasi transportasi publik dipahami sebagai pendekatan multidimensional yang mencakup aspek sistem, layanan, dan tata kelola (D. Setiawan et al., 2024; United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 2024). Keberhasilan integrasi ditentukan oleh keberadaan infrastruktur dan teknologi, dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam membangun koordinasi, membagi kewenangan, dan menjalin kolaborasi antaraktor. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas integrasi transportasi publik dari berbagai sudut pandang, seperti keterpaduan sistem dan antarmoda, kualitas layanan, aksesibilitas, hingga tata

kelola kelembagaan (Gusleni et al., 2021; Hrelja et al., 2020; Mokoma & Venter, 2023; Sogbe et al., 2024). Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa studi mengenai integrasi transportasi publik berkembang ke dalam tiga dimensi utama, yaitu sistem, layanan, dan tata kelola.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas integrasi transportasi publik secara terpisah antara aspek teknis, layanan, dan kelembagaan (Hendra et al., 2024; Liu et al., 2025). Akibatnya, hubungan antara dimensi sistem, layanan, dan tata kelola belum banyak dianalisis dalam satu kerangka yang menyeluruh, khususnya dari perspektif administrasi publik. Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini memandang integrasi transportasi publik sebagai isu multidimensional yang menghubungkan desain sistem, kualitas pelayanan, dan tata kelola kelembagaan melalui pendekatan *Systematic Literature Review*.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya memetakan perkembangan kajian integrasi transportasi publik sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, terutama pada aspek sistem, layanan, dan tata kelola. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana perkembangan kajian integrasi transportasi publik dalam literatur terkini serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan integrasi transportasi publik. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan publik dan *governance*. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan transportasi publik yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tinjauan Literatur

Integrasi transportasi publik merujuk pada penggabungan antarmoda secara fisik, keterpaduan jaringan, layanan, informasi, dan tata kelola dalam mendukung perjalanan pengguna secara berkelanjutan. Setiawan et al., (2024) menegaskan bahwa efektivitas integrasi bergantung pada keterhubungan aspek fisik, operasional, dan institusional yang berjalan secara bersamaan. Dalam kajian administrasi publik, konsep ini dipahami

sebagai bagian dari penyediaan layanan yang berorientasi pada aksesibilitas dan keandalan. Secara umum, integrasi transportasi publik mencakup tiga dimensi utama, yaitu sistem, layanan, dan kelembagaan.

Pada dimensi sistem, integrasi mencakup keterhubungan jaringan, simpul perpindahan, interoperabilitas tarif, penyelarasan jadwal, dan integrasi data guna mendukung perjalanan multimoda yang efisien. Perspektif ini menempatkan transportasi sebagai sarana untuk menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang dan layanan (Pourramazani & Miralles-Garcia, 2023). Dari perspektif layanan, Sogbe et al., (2024) menekankan pentingnya keselamatan, kenyamanan, keandalan, dan aksesibilitas dalam membentuk kualitas pengalaman pengguna. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi tidak hanya ditentukan oleh desain sistem, tetapi juga oleh kemampuan layanan dalam menciptakan pengalaman perjalanan yang mudah dan konsisten.

Keterpaduan sistem dan layanan tidak dapat berjalan tanpa dukungan kelembagaan yang memadai. Dalam administrasi publik, penyelenggaraan transportasi melibatkan pemerintah, operator, regulator, dan pengguna sehingga pembagian kewenangan serta hubungan antaraktor menjadi aspek penting. Dari dimensi kelembagaan, integrasi dipahami sebagai persoalan tata kelola yang mencakup sinkronisasi regulasi dan kolaborasi lintas institusi. Wang & Ran, (2023) menekankan bahwa *collaborative governance* berperan penting dalam mendukung hubungan antarorganisasi, sedangkan Hendra et al., (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi vertikal dan horizontal antar-pemerintahan maupun antar-sektor menjadi faktor penting dalam keberhasilan integrasi.

Ketiga dimensi dalam integrasi transportasi publik saling berkaitan satu sama lain. Dimensi sistem berperan dalam membangun konektivitas melalui jaringan, infrastruktur, tarif, dan integrasi data, sedangkan dimensi layanan berfokus pada aksesibilitas, kenyamanan, dan kemudahan perpindahan bagi pengguna. Di sisi lain, dimensi tata kelola memastikan tersedianya regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kerja sama antaraktor agar integrasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Keterkaitan tersebut semakin terlihat dalam perkembangan transportasi multimoda dan digitalisasi layanan. Rongen et al., (2025) menjelaskan bahwa integrasi

multimoda membutuhkan interoperabilitas layanan dan sistem informasi yang saling terhubung. Selain itu, Servou et al., (2023) menekankan bahwa pemanfaatan data digital dan teknologi cerdas mendorong tata kelola transportasi yang lebih kolaboratif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memandang integrasi transportasi publik sebagai hubungan antara sistem, layanan, dan tata kelola dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan.

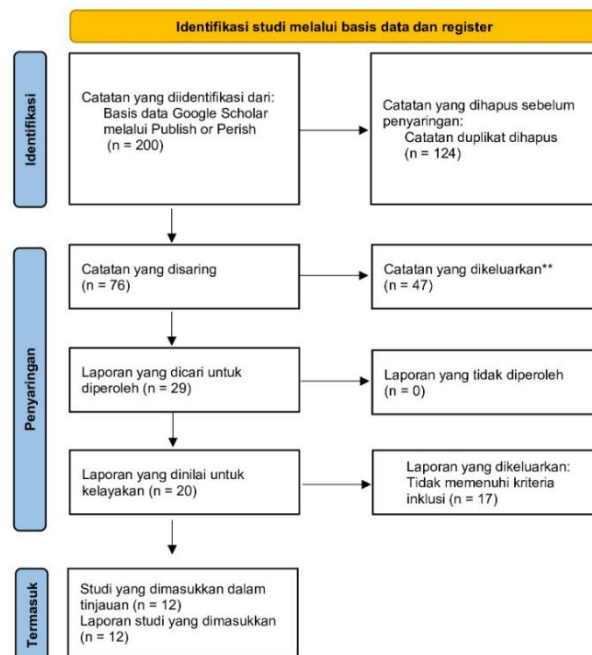
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji perkembangan studi integrasi transportasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode ini dipilih karena memungkinkan proses identifikasi, seleksi, dan sintesis artikel ilmiah dilakukan secara sistematis sesuai tujuan penelitian (Snyder, 2019).

Data penelitian berupa artikel ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar dengan bantuan aplikasi Publish or Perish. Pencarian dilakukan pada publikasi tahun 2023–2026 menggunakan kata kunci *public transport integration*, *integrated public transport system*, *multimodal transport integration*, dan *transport governance*, sehingga diperoleh 200 artikel pada tahap awal.

Kriteria inklusi mencakup artikel yang membahas integrasi transportasi publik dari aspek sistem, layanan, atau tata kelola, termasuk integrasi multimoda, aksesibilitas, kebijakan transportasi, koordinasi kelembagaan, kualitas layanan, sistem tarif, informasi perjalanan, pembiayaan, dan layanan pendukung transportasi publik. Sementara itu, artikel duplikat, tidak relevan, hanya membahas satu moda tanpa integrasi, bersifat teknis, tidak dapat diakses penuh, serta bukan artikel ilmiah tidak disertakan dalam penelitian.

Seleksi artikel mengikuti pedoman PRISMA 2020 yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi (Page et al., 2021). Setelah melalui proses penyaringan judul, abstrak, isi artikel, serta pengecekan aksesibilitas dokumen, diperoleh 12 artikel yang digunakan sebagai bahan analisis utama. Diagram proses seleksi artikel disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram PRISMA 2020

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Informasi dari 12 artikel terpilih diekstraksi berdasarkan elemen utama yang meliputi identitas artikel, metode penelitian, fokus kajian, dimensi integrasi, serta temuan pokok. Data tersebut kemudian diolah melalui analisis tematik dengan mengklasifikasikan temuan ke dalam tiga tema utama: sistem, layanan, dan tata kelola. Hasil pengolahan ini dimanfaatkan untuk memetakan evolusi kajian integrasi transportasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Hasil Penelitian

Bagian ini memaparkan hasil analisis terhadap 12 artikel mengenai integrasi transportasi publik. Temuan menunjukkan bahwa kajian integrasi transportasi publik membahas konektivitas antarmoda, tarif, informasi perjalanan, aksesibilitas, regulasi, koordinasi kelembagaan, serta layanan *first-mile* dan *last-mile*. Berdasarkan hasil tersebut, pembahasan difokuskan pada karakteristik artikel, perkembangan tema kajian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan integrasi transportasi publik.

Karakteristik Publikasi Artikel

Semua artikel dipilih berdasarkan kecocokan tema dengan integrasi transportasi publik, ketersediaan dokumen lengkap, serta relevansi publikasi terhadap fokus studi. Artikel-artikel yang dianalisis membahas integrasi transportasi publik dari berbagai perspektif wilayah, metode penelitian, dan sudut pandang. Identitas artikel yang dianalisis dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Identitas Artikel yang Dianalisis

Kode	Judul Artikel	Penulis	Jurnal/Prosiding	Fokus Kajian
A1	Strategi Pemerintah Kota Makassar dalam Reformasi Tata Kelola Transportasi Publik Guna Mewujudkan Layanan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Muh Jusuf Radja	MARS: Jurnal Magister Research, Vol. 4 No. 2	Reformasi tata kelola transportasi publik terintegrasi di Makassar
A2	Evaluasi Kebijakan Pelayanan Feeder Wira-Wiri sebagai Transportasi Terintegrasi di Kota Surabaya	Ryco Tarnuwardhana Putra, Alifatul Reniwati Zumroh, Ika Devy Pramudiana	Journal of Governance and Public Administration, Vol. 3 No. 1	Evaluasi layanan feeder Wira-Wiri sebagai transportasi terintegrasi
A3	Toward a Connected City Accessibility Planning for Multimodal Transport Integration in Palembang	Paulina M. Latuheru, Driaskoro Budi Sidharta, Cut Adinda, Budiharso, Tertib Sinulingga	Jurnal Penelitian STTD, Vol. 16 No. 1	Perencanaan aksesibilitas dan integrasi multimoda di Palembang
A4	Integrasi Kebijakan dan Partisipasi Publik dalam Rapat Koordinasi Penyediaan Angkutan Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara	Sylsiani Mursalim dkk.	Aksi Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan, Vol. 3 No. 1	Koordinasi kebijakan dan partisipasi publik dalam penyediaan angkutan umum
A5	The Dual Processes of Fragmentation and Integration in Transport Tendering: Understanding the Dynamics of Transport Integration Through a	David P. Weinreich & Karel Martens	SSRN Preprint	Fragmentasi dan integrasi layanan transportasi melalui proses tender nasional

The 2st National Public Administration Student Summit (NPASS)
"Innovative and Sustainable Governance for Inclusive Public Administration"

	Nationally Managed Tendering Process			
A6	Kajian Keterpaduan Antar Moda: Sebuah Analisis Aksesibilitas Transportasi Publik pada Layanan Feeder Wira-Wiri Surabaya	Sagita Alfira Supriyadi & Galih Wahyu Pradana	Publika, Vol. 12 No. 3	Aksesibilitas dan keterpaduan antarmoda pada layanan feeder
A7	Penerapan Kebijakan Transportasi Publik Terpadu MRT dalam Investasi Daerah di Jakarta	Raphael Valentino Setiawan, Regina Vianca Aurelia ES, Dwi Putra Nugraha	Borneo Law Review, Vol. 9 No. 1	Kebijakan transportasi publik terpadu MRT dan integrasi antarmoda
A8	Integrasi Transportasi Publik di Kota Tangerang: Tinjauan Organisasi, Operasional, dan Fisik	Syifa Fazria Ariani dkk.	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 15 No. 1	Integrasi transportasi dari dimensi organisasi, operasional, dan fisik
A9	Pengaruh Konektivitas Antar Moda, Sistem Informasi Terpadu, dan Kebijakan Tarif Integrasi terhadap Tingkat Mobilitas Masyarakat dalam Konteks Transportasi Publik	Lucano Farros Naufal	Jurnal Pendidikan Siber Nusantara, Vol. 1 No. 3	Konektivitas antarmoda, informasi terpadu, tarif integrasi, dan mobilitas masyarakat
A10	Financing Integrated Rapid Public Transport Systems in South Africa: Mechanisms, Challenges, and Opportunities for Sustainable Mobility	Rosinah Modikoa Pillay, Khensani Richard Chauke, Xolani Thusi	International Journal of Sustainability in Business and Economics, Vol. 2 No. 1	Pembiayaan sistem transportasi publik cepat terintegrasi
A11	The Public Transport Regional Integration for Ensuring Sustainability and Accessibility	Andrius Samuilovas & Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė	Transportation Research Procedia, Vol. 91	Integrasi transportasi publik regional untuk keberlanjutan dan aksesibilitas
A12	Integrating Ride-Hailing with Public Transport in Jakarta, Indonesia: Drivers' Perspectives on Challenges, Efficiency, and Policy Solution	Haureta Nova Aisyah, Hitomi Sato, Toshiyuki Yamamoto	Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 16	Integrasi ride-hailing dengan transportasi publik dari perspektif pengemudi

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 1, artikel yang dianalisis diterbitkan pada periode 2023–2026, dengan dominasi publikasi tahun 2025 dan 2026. Lokasi penelitian mencakup Indonesia dan internasional, seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, Israel, Afrika Selatan, dan Lithuania. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi transportasi publik masih menjadi isu yang relevan dalam pengembangan layanan dan konektivitas transportasi di berbagai wilayah.

Artikel-artikel tersebut menggunakan beragam metode penelitian, seperti kualitatif, studi kasus, survei, *mixed methods*, analisis dokumen, hingga tinjauan literatur. Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian membahas integrasi antarmoda dan multimoda, layanan *feeder*, *first-mile* dan *last-mile*, regulasi, koordinasi kelembagaan, pendanaan, serta keberlanjutan layanan.

Perkembangan Tema Kajian Integrasi Transportasi Publik

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kajian integrasi transportasi publik berkembang pada aspek teknis, pelayanan, dan tata kelola, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pemetaan Perkembangan Kajian Integrasi Transportasi Publik

Fokus Kajian	Artikel Terkait	Sajian Hasil
Integrasi Antarmoda dan Multimoda	A3, A6, A8, A9, A11	Keterhubungan antarmoda melalui rute, jadwal, fasilitas fisik, sistem tarif, dan informasi perjalanan.
Layanan <i>Feeder</i>	A2, A6	Menempatkan feeder sebagai layanan penghubung antara pengguna dan moda utama.
Tata Kelola Kelembagaan	A1, A4, A5, A8	Koordinasi antarinstansi, hubungan antaroperator, pembagian kewenangan, dan reformasi kelembagaan.
Regulasi dan Kebijakan Integrasi	A4, A7	Kebutuhan aturan, standar integrasi, dan sinkronisasi kebijakan transportasi publik.
Tarif, Tiket, dan Informasi Terpadu	A3, A5, A7, A9, A11	Sistem pembayaran, tiket terpadu, informasi rute, informasi jadwal, dan pemanfaatan teknologi digital.
Pembiayaan dan Keberlanjutan	A10, A11	Kebutuhan pendanaan, skema pembiayaan, dan keberlanjutan sistem transportasi publik terintegrasi.
Integrasi <i>first-mile</i> dan <i>last-mile</i>	A12	Peran <i>ride-hailing</i> sebagai layanan penghubung menuju dan dari simpul transportasi publik.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 2, kajian integrasi transportasi publik didominasi oleh pembahasan integrasi antarmoda dan multimoda, seperti keterkaitan rute, jadwal, infrastruktur, tarif, dan informasi perjalanan. Selain itu, beberapa artikel juga menyoroti layanan *feeder* sebagai penghubung menuju moda transportasi utama. Kajian lain membahas tata kelola, regulasi, sistem tiket, dan informasi terintegrasi yang menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga serta dukungan teknologi dalam integrasi transportasi publik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Integrasi Transportasi Publik

Selain aspek tersebut, beberapa penelitian juga membahas pembiayaan, keberlanjutan, serta integrasi *first-mile* dan *last-mile*, termasuk layanan berbasis aplikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kajian integrasi transportasi publik tidak hanya berfokus pada konektivitas fisik, tetapi juga mencakup aspek pelayanan, tata kelola, teknologi, dan keberlanjutan. Hasil analisis kemudian mengelompokkan faktor keberhasilan integrasi ke dalam tiga aspek utama, yaitu sistem, layanan, dan tata kelola sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Integrasi Transportasi Publik

Aspek	Faktor	Artikel Terkait	Sajian Hasil
Sistem	Keterhubungan jaringan dan rute	A2, A3, A5, A8, A11	Jaringan dan rute yang saling terhubung muncul sebagai faktor dalam integrasi transportasi publik.
	Sinkronisasi jadwal dan operasional	A2, A3, A5, A8, A11	Jadwal, <i>headway</i> , dan pola operasional menjadi bagian dari keterpaduan sistem layanan.
	Tarif dan tiket terpadu	A1, A3, A5, A7, A9, A11	Tarif dan tiket terpadu muncul sebagai unsur yang mendukung kemudahan perpindahan moda.
	Informasi dan teknologi digital	A3, A6, A9, A11, A12	Informasi rute, jadwal, lokasi moda lanjutan, aplikasi, dan data <i>real-time</i> menjadi bagian dari sistem integrasi.
	Pembiayaan berkelanjutan	A10, A11	Pembiayaan muncul sebagai faktor yang berkaitan dengan keberlanjutan sistem transportasi publik terintegrasi.
Layanan	Aksesibilitas menuju moda transportasi	A2, A3, A6, A8, A11	Akses menuju halte, stasiun, terminal, titik jemput, dan fasilitas penghubung menjadi bagian dari faktor layanan.

	Kualitas layanan <i>feeder</i>	A2, A6	Layanan <i>feeder</i> berkaitan dengan frekuensi kedatangan, ketersediaan armada, integrasi karcis, dan informasi moda lanjutan.
	Kemudahan perpindahan antarmoda	A3, A6, A8, A12	Perpindahan antarmoda berkaitan dengan fasilitas fisik, jarak perpindahan, kondisi halte, akses pejalan kaki, dan titik jemput.
	Layanan <i>first-mile</i> dan <i>last-mile</i>	A2, A6, A12	<i>Feeder</i> dan <i>ride-hailing</i> muncul sebagai penghubung perjalanan awal dan akhir pengguna.
Tata Kelola	Koordinasi antarinstansi dan operator	A1, A4, A5, A7, A8	Koordinasi antarinstansi dan operator muncul sebagai faktor dalam pengelolaan integrasi transportasi publik.
	Kejelasan regulasi dan kewenangan	A5, A7, A8	Regulasi dan kewenangan berkaitan dengan pengaturan tarif, infrastruktur, operasional, dan koordinasi antarmoda.
	Partisipasi publik dan pelibatan aktor layanan	A4, A12	Pelibatan masyarakat, operator, dan pengemudi muncul dalam kajian integrasi transportasi publik.
	Reformasi tata kelola dan perlindungan operator	A1, A5	Reformasi kelembagaan dan perlindungan operator muncul dalam kajian yang membahas perubahan tata kelola transportasi.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 3, aspek sistem menjadi faktor yang paling sering muncul dalam penelitian. Faktor ini meliputi keterhubungan jaringan dan rute, sinkronisasi jadwal dan operasional, tarif dan tiket terintegrasi, informasi serta teknologi digital, hingga pembiayaan berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi transportasi publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem dalam menghubungkan moda transportasi, menyelaraskan operasional, serta menyediakan layanan pembayaran dan informasi yang terintegrasi. Dukungan teknologi dan pembiayaan juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sistem transportasi publik.

Pada aspek layanan, faktor yang muncul meliputi aksesibilitas, kualitas layanan *feeder*, kemudahan transfer antarmoda, serta layanan *first-mile* dan *last-mile*. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kemudahan pengguna dalam menjangkau halte, terminal, maupun moda lanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi transportasi

publik tidak hanya bergantung pada konektivitas sistem, tetapi juga pada kenyamanan dan kemudahan perjalanan pengguna dari titik asal hingga tujuan.

Sementara itu, pada aspek tata kelola, faktor utama mencakup koordinasi antarinstansi dan operator, kejelasan regulasi dan kewenangan, partisipasi publik, serta reformasi tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi transportasi publik memerlukan kolaborasi antarlembaga, dukungan regulasi yang jelas, dan keterlibatan berbagai aktor dalam proses integrasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi transportasi publik ditentukan oleh keterpaduan aspek sistem, layanan, dan tata kelola secara bersamaan.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian integrasi transportasi publik pada periode 2023–2026 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Integrasi tidak lagi dipahami sebatas keterhubungan fisik antarmoda melalui jaringan, rute, jadwal, maupun infrastruktur, tetapi berkembang menjadi konsep multidimensional yang mencakup aspek sistem, layanan, dan tata kelola secara simultan (Ariani et al., 2026; Latuheru et al., 2025; Samuilovas & Ušpalytė-Vitkūnienė, 2025). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa fokus kajian integrasi transportasi publik telah bergerak dari pendekatan yang bersifat teknis menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik. Temuan ini memperlihatkan bahwa integrasi tidak lagi hanya dipandang sebagai upaya menghubungkan moda transportasi, melainkan sebagai upaya menciptakan pengalaman perjalanan yang terhubung, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik, pergeseran tersebut menunjukkan bahwa integrasi transportasi publik semakin dekat dengan konsep integrasi pelayanan publik (*public service integration*). Keberhasilan integrasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur atau teknologi yang saling terhubung, tetapi juga oleh kemampuan berbagai organisasi untuk menghadirkan pelayanan yang terkoordinasi dan berkesinambungan. Wouters et al., (2023 menjelaskan bahwa pelayanan publik yang terintegrasi menuntut koordinasi lintas organisasi agar pengguna memperoleh layanan yang utuh dalam satu rangkaian pengalaman pelayanan. Temuan penelitian ini sejalan

dengan pandangan Setiawan et al., (2024) yang menegaskan bahwa integrasi transportasi membutuhkan keterpaduan fisik, operasional, dan institusional secara bersamaan. Dengan demikian, konektivitas sistem tidak akan menghasilkan manfaat yang optimal apabila tidak diikuti oleh integrasi layanan dan tata kelola yang mampu menyatukan berbagai kepentingan kelembagaan.

Perkembangan kajian juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari moda menuju pengguna. Jika pada penelitian-penelitian sebelumnya keberhasilan integrasi lebih banyak diukur melalui keterhubungan jaringan transportasi, maka artikel-artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan mulai bergeser pada kemampuan sistem dalam menciptakan perjalanan yang mudah, nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Munculnya isu aksesibilitas, layanan *feeder*, *first-mile* dan *last-mile*, serta integrasi *ride-hailing* menunjukkan bahwa perhatian penelitian semakin diarahkan pada pengalaman pengguna secara menyeluruh (Aisyah et al., 2025; Putra et al., 2025; Supriyadi & Pradana, 2024). Temuan ini mendukung pandangan Pourramazani & Miralles-Garcia, (2023) yang menempatkan aksesibilitas sebagai tujuan utama transportasi publik karena transportasi pada dasarnya berfungsi menghubungkan masyarakat dengan berbagai peluang sosial dan ekonomi. Dengan kata lain, keberhasilan integrasi tidak lagi cukup diukur dari seberapa banyak moda yang terhubung, tetapi dari seberapa besar sistem transportasi mampu mempermudah mobilitas masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan paradoks yang menarik dalam perkembangan literatur integrasi transportasi publik. Hampir seluruh artikel menempatkan koordinasi dan tata kelola sebagai faktor penting dalam keberhasilan integrasi, tetapi sebagian besar penelitian masih lebih banyak membahas aspek fisik dan operasional dibandingkan mekanisme kolaborasi yang mendasarinya. Literatur telah cukup berhasil menjelaskan apa saja komponen yang harus diintegrasikan, namun belum banyak menjelaskan bagaimana integrasi tersebut diwujudkan dalam situasi yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan, kewenangan, dan sumber daya yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan kajian integrasi transportasi publik masih didominasi oleh perspektif teknokratis yang berfokus pada desain sistem,

sementara dinamika kelembagaan dan proses tata kelola belum memperoleh perhatian yang setara.

Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa integrasi transportasi publik pada dasarnya merupakan persoalan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Aoki et al., (2023) menjelaskan bahwa integrasi transportasi berlangsung dalam lingkungan yang melibatkan banyak organisasi dan lintas batas kewenangan. Pandangan ini sejalan dengan Ansell & Gash, (2008), Emerson et al., (2012), serta Wang & Ran, (2023) yang menekankan bahwa tata kelola kolaboratif diperlukan ketika suatu persoalan tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi secara mandiri. Dalam konteks transportasi publik, pemerintah, operator transportasi, regulator, penyedia layanan digital, dan masyarakat memiliki peran yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem teknis yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan aktor-aktor tersebut dalam membangun tujuan bersama, menyepakati mekanisme koordinasi, serta mempertahankan kolaborasi dalam jangka panjang (Mursalim et al., 2026; R. V. Setiawan et al., 2025; Weinreich & Martens, 2024).

Analisis terhadap dua belas artikel menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi transportasi publik dipengaruhi oleh tiga kelompok faktor utama, yaitu sistem, layanan, dan tata kelola. Faktor sistem mencakup keterhubungan jaringan dan rute, sinkronisasi operasional, integrasi tarif dan tiket, sistem informasi perjalanan, teknologi digital, serta pembiayaan berkelanjutan (Farros Naufal, 2023; Pillay et al., 2026). Faktor layanan mencakup aksesibilitas, kualitas layanan *feeder*, kemudahan perpindahan antar moda, serta dukungan layanan *first-mile* dan *last-mile* (Putra et al., 2025; Supriyadi & Pradana, 2024). Sementara itu, faktor tata kelola meliputi koordinasi antar instansi, kejelasan regulasi dan kewenangan, partisipasi publik, reformasi kelembagaan, serta hubungan antara pemerintah dan operator transportasi (Ariani et al., 2026; Radja, 2025).

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk hubungan yang saling bergantung. Sistem yang terintegrasi tidak secara otomatis menghasilkan layanan yang baik apabila pengguna masih mengalami hambatan akses atau perpindahan antar moda. Sebaliknya,

layanan yang nyaman juga sulit dipertahankan apabila tidak didukung oleh tata kelola yang mampu mengoordinasikan berbagai aktor yang terlibat. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama integrasi transportasi publik bukan terletak pada kurangnya komponen integrasi, melainkan pada kemampuan menyelaraskan hubungan antar komponen tersebut. Dalam perspektif *whole-of-government*, kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi tidak hanya berkaitan dengan penyatuan tujuan kebijakan, tetapi juga menyangkut kemampuan organisasi untuk bekerja secara terkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama (Trein et al., 2019). Oleh karena itu, tata kelola tidak dapat lagi diposisikan sebagai faktor pelengkap, melainkan sebagai fondasi yang memungkinkan integrasi sistem dan layanan berjalan secara efektif.

Perkembangan teknologi digital semakin memperkuat pentingnya tata kelola dalam integrasi transportasi publik. Kehadiran sistem informasi terintegrasi, aplikasi perjalanan, data *real-time*, serta konsep *Mobility-as-a-Service* (MaaS) menunjukkan bahwa integrasi transportasi semakin bergantung pada kemampuan mengelola data dan teknologi lintas organisasi. Hirschhorn et al., (2019) menjelaskan bahwa dalam ekosistem MaaS pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai arsitek, regulator, dan fasilitator kolaborasi antaraktor. Di sisi lain, Servou et al., (2023) mengingatkan bahwa integrasi digital berpotensi menimbulkan ketimpangan baru apabila tidak disertai transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada nilai publik. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat dipisahkan dari tata kelola karena efektivitas teknologi sangat ditentukan oleh kapasitas institusi yang mengelolanya.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa integrasi transportasi publik perlu dipahami sebagai bagian dari kajian administrasi publik dan *governance*, bukan semata-mata sebagai isu transportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara sistem, layanan, dan tata kelola dibandingkan sekadar keberhasilan pembangunan infrastruktur atau konektivitas jaringan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian integrasi transportasi publik ke arah *public service integration*, *collaborative governance*, dan *network governance*.

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dan operator perlu memandang integrasi transportasi publik sebagai pengalaman perjalanan yang utuh dari titik asal hingga tujuan. Upaya integrasi tidak cukup dilakukan melalui pembangunan infrastruktur atau penambahan moda transportasi baru, tetapi juga perlu diikuti oleh penguatan layanan *feeder*, pengembangan layanan *first-mile* dan *last-mile*, integrasi tarif dan pembayaran, interoperabilitas data, serta penguatan koordinasi antarinstansi dan operator. Dengan demikian, integrasi transportasi publik dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan mobilitas perkotaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah artikel yang dianalisis terbatas pada dua belas artikel yang memenuhi kriteria seleksi sehingga hasil penelitian lebih merepresentasikan perkembangan literatur terkini dibandingkan perkembangan historis kajian integrasi transportasi publik secara keseluruhan. Kedua, penelitian menggunakan data sekunder sehingga tidak memungkinkan verifikasi langsung terhadap pengalaman pengguna, operator, maupun pembuat kebijakan. Ketiga, perbedaan konteks wilayah, metode penelitian, dan fokus kajian antarartikel berpotensi memengaruhi tingkat keterbandingan hasil sintesis yang dilakukan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sumber literatur melalui basis data internasional seperti Scopus dan Web of Science, memperpanjang rentang waktu publikasi, serta mengombinasikan pendekatan *systematic literature review* dengan studi empiris pada wilayah tertentu. Penelitian mendatang juga perlu lebih fokus mengkaji proses kolaborasi antaraktor dalam implementasi integrasi transportasi publik sehingga hubungan antara sistem, layanan, dan tata kelola dapat dipahami secara lebih mendalam.

Melalui proses penelusuran dan sintesis literatur, penulis menyadari bahwa integrasi transportasi publik merupakan isu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar menghubungkan berbagai moda transportasi. Pada awalnya, integrasi lebih mudah dipahami sebagai persoalan infrastruktur, rute, atau tarif. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi justru sangat dipengaruhi oleh kemampuan berbagai organisasi untuk bekerja sama dalam menyediakan layanan yang berorientasi

pada kebutuhan masyarakat. Penulis melihat bahwa masa depan integrasi transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian integrasi transportasi publik pada periode 2023–2026 mengalami perkembangan yang signifikan dari pendekatan yang berfokus pada keterhubungan fisik antarmoda menuju pendekatan yang lebih multidimensional. Integrasi transportasi publik tidak lagi dipahami sebatas penyatuan jaringan, rute, jadwal, dan infrastruktur, tetapi juga mencakup integrasi layanan, informasi, teknologi digital, pembiayaan, serta tata kelola kelembagaan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa integrasi transportasi publik semakin dipandang sebagai bagian dari integrasi pelayanan publik yang menempatkan pengalaman perjalanan pengguna sebagai fokus utama. Dengan demikian, kajian integrasi transportasi publik telah bergerak dari orientasi teknis menuju orientasi pelayanan dan governance yang lebih luas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan integrasi transportasi publik ditentukan oleh keterpaduan tiga faktor utama, yaitu sistem, layanan, dan tata kelola. Aspek sistem berperan dalam menyediakan konektivitas jaringan, informasi, dan teknologi yang terintegrasi, sedangkan aspek layanan memastikan aksesibilitas, kenyamanan, serta kemudahan perjalanan pengguna. Sementara itu, tata kelola berfungsi menyelaraskan berbagai aktor, regulasi, dan sumber daya yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi publik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi tidak dapat dicapai hanya melalui pembangunan infrastruktur atau inovasi teknologi, melainkan memerlukan kapasitas *collaborative governance* yang mampu menghubungkan sistem, layanan, dan kelembagaan secara berkelanjutan untuk mendukung mobilitas perkotaan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, H. N., Sato, H., & Yamamoto, T. (2025). Integrating ride-hailing with public transport in Jakarta, Indonesia: Drivers' perspectives on challenges, efficiency, and policy solution. *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, 16, 1–22. <https://doi.org/10.11175/easts.16.PP4083>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aoki, N., Tay, M., & Rawat, S. (2023). Whole-of-government and joined-up government: a systematic literature review. *Public Administration*, 102(2), 733–752. <https://doi.org/10.1111/padm.12949>
- Ariani, S. F., Fadli, Y., Setiawan, S., Chumaedy, A., & Ginanjar, A. (2026). Integrasi transportasi publik di Kota Tangerang: Tinjauan organisasi, operasional, dan fisik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 15(1), 174–191. <https://doi.org/10.33366/jisip.v15i1.3782>
- Bank, W. (2024). *Mapping urban transport governance*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099071824121028415/pdf/P1785751abc77e071921f1a46ad3550e8e.pdf>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Farros Naufal, L. (2023). Pengaruh konektivitas antar moda, sistem informasi terpadu, dan kebijakan tarif integrasi terhadap tingkat mobilitas masyarakat dalam konteks transportasi publik. *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara*, 1(3), 127–134. <https://doi.org/10.38035/jpsn.v1i3.217>
- Gusleni, Y., Lintansari, & Nugroho, D. P. (2021). Evaluasi integrasi fasilitas alih moda pada simpul transportasi di perkotaan Yogyakarta. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 19(2), 17–24. <https://doi.org/10.25104/mtm.v19i2.2036>

- Hendra, O., Prasajo, E., Fathurrahman, R., & Pilbeam, C. (2024). Vertical-horizontal actor collaboration in governance network: A systematic review. *Public Organization Review*, 24, 1233–1252. <https://doi.org/10.1007/s11115-024-00794-w>
- Hirschhorn, F., Paulsson, A., Sørensen, C. H., & Veeneman, W. (2019). Public transport regimes and mobility as a service: Governance approaches in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 130, 178–191. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.09.016>
- Hrelja, R., Khan, J., & Pettersson, F. (2020). How to create efficient public transport systems? A systematic review of critical problems and approaches for addressing the problems. *Transport Policy*, 98, 186–196. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.10.012>
- Latuheru, P. M., Firzatullah, R., Insani, C. I., Alam, K., Sidharta, D. B., Setiawan, B., & Sinulingga, T. (2025). Toward a connected city: Accessibility planning for multimodal transport integration in Palembang. *Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat*, 16(1), 126–133. <https://doi.org/10.55511/jpsttd.v16i1.724>
- Liu, X., Schmöcker, J. D., Zhao, J., & Yang, X. (2025). How to make service better? A review on developing service-oriented public transit systems. *Transport Reviews*, 45(5), 672–695. <https://doi.org/10.1080/01441647.2025.2502629>
- Mokoma, L., & Venter, C. (2023). Pathways to integrating paratransit and formal public transport: Case studies from Tshwane, South Africa. *Research in Transportation Economics*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0739885923000963>
- Mursalim, S., Sulisty, G. A., Laode, R. T., Sutriana, R., & Satyadharma, M. (2026). Integrasi kebijakan dan partisipasi publik dalam rapat koordinasi penyediaan angkutan umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Aksi Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, 3(1), 125–134. <https://doi.org/10.62383/aksinyata.v3i1.2820>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ...

- Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pillay, R. M., Chauke, K. R., & Thusi, X. (2026). Financing integrated rapid public transport systems in South Africa: Mechanisms, challenges, and opportunities for sustainable mobility. *International Journal of Sustainability in Business and Economics*, 2(1). <https://doi.org/10.51137/wrp.ijse.391>
- Pourramazani, H., & Miralles-Garcia, J. L. (2023). Evaluating urban transportation accessibility: A systematic review of access dimensions and indicators. *International Journal of Transport Development and Integration*, 7(4), 331–339. <https://doi.org/10.18280/ijtdi.070407>
- Putra, R. T., Zumroh, A. R., & Pramudiana, I. D. (2025). Evaluasi kebijakan pelayanan feeder Wira-Wiri sebagai transportasi terintegrasi di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 3(1), 189–197. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i1.3520>
- Radja, M. J. (2025). Strategi Pemerintah Kota Makassar dalam reformasi tata kelola transportasi publik guna mewujudkan layanan yang terintegrasi dan berkelanjutan. *MARS: Jurnal Magister Research*, 4(2), 23–32. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/MARS/article/view/866>
- Rongen, T., Lenferink, S., Arts, J., & Tillema, T. (2025). Examining network governance of multimodal integration: A comparative study of rural mobility hubs in The Netherlands. *Case Studies on Transport Policy*, 21, 101525. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2025.101525>
- Samuilovas, A., & Ušpalytė-Vitkūnienė, R. (2025). The public transport regional integration for ensuring sustainability and accessibility. *Transportation Research Procedia*, 91, 720–727. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2025.10.092>
- Servou, E., Behrendt, F., & Horst, M. (2023). Data, AI and governance in MaaS – Leading to sustainable mobility? *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 19. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2023.100806>
- Setiawan, D., Priyanto, S., & Amrozi, M. R. F. (2024). Integration of public transport systems for enhanced passenger mobility: A systematic review. *International Journal of*

- Transport Development and Integration*, 8(1), 109–118.
<https://doi.org/10.18280/ijtdi.080110>
- Setiawan, R. V., Vianca, R., Es, A., Putra, D., Jalan, N., & Thamrin, M. H. (2025). Penerapan kebijakan transportasi publik terpadu MRT dalam investasi daerah di Jakarta. In *BORNEO Law Review* (Vol. 9, Number 1). <https://doi.org/10.35334/08smay21>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sogbe, E., Susilawati, S., & Pin, T. C. (2024). Scaling up public transport usage: a systematic literature review of service quality, satisfaction and attitude towards bus transport systems in developing countries. In *Public Transport* (Vol. 17). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s12469-024-00367-6>
- Supriyadi, S. A., & Pradana, G. W. (2024). Kajian keterpaduan antar moda: Sebuah analisis aksesibilitas transportasi publik pada layanan feeder Wira-Wiri Surabaya. *Journal Publika*, 12(3), 793–802. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p793-802>
- Trein, P., Meyer, I., & Maggetti, M. (2019). The Integration and coordination of public policies: A systematic comparative review. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 21(4), 332–349.
<https://doi.org/10.1080/13876988.2018.1496667>
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). (2024). *Integrated public transport systems: A guidebook for policymakers*. <https://repository.unescap.org/server/api/core/bitstreams/1fd7b7c9-7d69-4c5b-afff-e9eafecd6012/content>
- Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public Management Review*, 25(6), 1187–1211.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389>
- Weinreich, D., & Martens, K. (2024). The dual processes of fragmentation and integration in transport tendering: Understanding the dynamics of transport integration

through a nationally managed tendering process. SSRN.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4760830>

Wouters, S., Janssen, M., Lember, V., & Cromptvoets, J. (2023). Strategies to advance the dream of integrated digital public service delivery in inter-organizational collaboration networks. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101779. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101779>